

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu disertakan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai referensi atau rujukan dalam penelitian. Penelitian terdahulu juga diperlukan guna mengetahui tingkat perbedaan penelitian dengan judul kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat melalui Sekolah Perempuan Desa dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian berbeda dengan studi yang diambil oleh peneliti. Berikut hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi atau rujukan oleh peneliti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Shofiyyahtusya'diah & Rahaju, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Perempuan (SEKOPER) di Desa Kramatinggil Kabupaten Gresik". Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik, dengan fokus pada aspek isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Merielle S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan (SEKOPER) di Desa Kramatinggil, Kabupaten Gresik telah berlangsung selama sekitar 4 tahun. Meskipun program tersebut sudah dijalankan, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu kualitas tenaga manusia yang kurang memadai, keterbatasan dana, serta kurangnya sosialisasi program oleh pihak birokrasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi program pemberdayaan perempuan melalui Sekoper di Desa Kramatinggil, Kabupaten Gresik masih memerlukan perbaikan dan dukungan yang lebih optimal dari berbagai pihak terkait agar dapat mencapai tujuan pemberdayaan perempuan secara lebih efektif.

Kedua, penelitian yang dilakukan (Hukum & Volume, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Sadar Hukum Melalui Sekolah Pemberdayaan”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons. Teori ini menyatakan bahwa perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern diiringi oleh proses diferensiasi dan integrasi. Proses ini disebut struktural fungsional, yang berfokus pada studi tentang permasalahan pernikahan siri, sebagaimana perkembangan dan tuntutan kehidupan modern di satu sisi, serta kekhawatiran terhadap tindakan zina di sisi lain. Fokus penelitiannya adalah mengoptimalkan pemberdayaan perempuan sadar hukum melalui Sekolah Pemberdayaan Desa Kalisat, Kecamatan Rembang-Pasuruan serta memecahkan masalah-masalah di Desa Kalisat seperti praktik kawin siri, tingkat pengangguran yang tinggi, serta rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi melalui program Sekolah Pemberdayaan. Hasil dari penelitian ini adalah penguatan kaum perempuan sangatlah penting melalui peningkatan kualitas *soft skill* dan *life skill* yang berbasis home industri akan menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan sebagai jalan keluar atau metode alternatif pengikisan budaya nikah siri. Budaya kawin siri yang tercipta karena pengacuhan serta ketidakperdulian masyarakat dikarenakan mayoritas kaum perempuan berpendidikan rendah dan hidup dalam keluarga miskin serta rendahnya pengetahuan teknologi dan perlindungan hukum serta kurang andilnya pemerintah secara hukum terhadap maraknya pernikahan siri, sehingga semakin kompleks permasalahan kemiskinan yang berujung terjadinya pernikahan siri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Tamarinda & Jatningsih, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Dukungan Suami Kepada Istri Dalam Membangun Kesetaraan Gender Melalui Pendirian Sekolah Perempuan Desa di Kota Batu”. Penelitian ini menggunakan teori dukungan social Sarafino yang membagi dukungan menjadi tiga komponen: emosional, instrumental, dan informasi dengan pendekatan kualitatif dan metode deskripsi naratif. Hasilnya menunjukkan bahwa dukungan suami

memainkan peran penting dalam kelancaran aktivitas istri di SPD. dukungan berupa emosional, saran, bantuan finansial, serta keterlibatan langsung, seperti membantu pelaksanaan kegiatan SPD berlangsung dan menjadi motivasi utama bagi para istri untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dukungan tidak hanya memperkuat istri secara pribadi, tetapi juga meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan di desa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Makna Berdaya Bagi Peserta Sekolah Perempuan Desa Di Dusun Sukorembug Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu”. Jenis penelitian ini merupakan subjektif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori fenomenologi transedental dari Edmund Husserl sebagai landasan konsetual. Melalui penelitian menunjukkan bahwa keberdayaan perempuan tidak hanya soal ekonomi atau kemampuan fisik, tetapi juga menyangkut dimensi psikologi, social, dan spiritual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna keberdayaan bagi peserta mencakup tiga aspek. Perempuan yang berdaya ditandai dengan keberanian mengambil keputusan, kemampuan menciptakan penghasilan tambahan, keberanian menyampaikan pendapat di ruang publik, serta kontribusi dalam mendidik dan menciptakan keluarga harmonis. Para peserta juga mengalami perubahan positif, seperti peningkatan kepercayaan diri, keberanian berorganisasi, serta kemampuan membantu sesama perempuan melalui ilmu yang mereka dapatkan. Selain itu, keberdayaan juga dilihat dari kemampuan perempuan untuk menjalani hidup dengan makna, meskipun kondisi yang sulit, serta menunjukkan komitmen untuk membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. SPD berhasil mendorong perempuan untuk lebih mandiri, kreatif, dan bijaksana meski tantangan patriarki masih membayangi hidup mereka.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Kurochman et al., 2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Sebagai Upaya Peningkatan Peserta Sekolah Perempuan Kelopak Gayatri Desa Gumelem Kulon Banjarnegara”. Penelitian ini adalah jenis kualitatif

dengan metode pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan budidaya TOGA. Teori yang mendasari adalah pendekatan edukasi partisipatif, yang menekankan pada pemberian pengetahuan dan praktik langsung sebagai upaya pemberdayaan komunitas. Hasil akhir menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang manfaat TOGA dan mengolahnya menjadi tanaman herbal. Adanya kebun TOGA memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penggunaan obat herbal dan potensi penjualan hasil budidaya.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh (Marofah & Ma'ruf, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wiringanom Kabupaten Gresik”. Penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan perempuan melalui program sekolah perempuan yang dimana focus penelitiannya adalah perempuan miskin dan marginal yang sulit mendapatkan Pendidikan formal karena berbagai kendala, seperti biaya, akses Pendidikan, dan budaya patriarki yang kuat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program sekolah perempuan berhasil meningkatkan kesadaran perempuan akan kesetaraan gender dan peran mereka dalam masyarakat. Program ini juga memberikan keterampilan praktis, seperti Bertani secara organik, dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa melalui forum-forum resmi. Sebagai hasilnya, banyak peserta yang mengalami peningkatan kapasitas diri dan kontribusi secara nyata dalam masyarakat.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh (Pasaribu & Apriansyah, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Rumah Srikandi: Sekolah Perempuan Sebagai Upaya Pengembangan *Entrepreneur* Guna Menunjang Perekonomian Masyarakat Desa Kasang Pudak”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sekaligus kualitatif yang berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan kewirausahaan. Program ini dijalankan oleh tim pelaksana PPK ORMAWA IMATIKA Universitas Jambi di Desa Kasang Pudak, Jambi. Jenis penelitian ini menggunakan metode

kombinasi, yaitu kualitatif dalam menganalisis kebutuhan masyarakat dan dampak social program, serta kuantitatif melalui pengukuran indikator ekonomi, serta peningkatan jumlah UMKM dan kontribusi ekonomi sector informal. Program yang dilaksanakan salah satunya yaitu Srikandi Expo, yang dimana merupakan sebuah acara untuk memamerkan hasil karya peserta sekolah perempuan sekaligus sebagai memperluas jaringan usaha local. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan program ini dalam meningkatkan jumlah UMKM di desa, memperkuat keterampilan perempuan, dan mengurangi ketergantungan ekonomi keluarga pada sector informal. Selain itu, program ini juga mendorong pelestarian budaya lokal dan menciptakan peluang kerja baru, sehingga memberikan dampak ekonomi dan social yang signifikan bagi masyarakat Desa Kasang Puduk, Jambi.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Sekolah Perempuan dan Pendidikan Parenting: Langkah Awal Menuju Masyarakat Desa Kandangrejo Lebih Baik”. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif. pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei untuk mengukur peningkatan keterampilan parenting, sementara pendekatan kualitatif melibatkan wawancara dan observasi untuk memahami kebutuhan serta dampak program peserta. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan parenting peserta sesuai judul penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan khususnya dalam pengasuhan anak. Sebanyak 80% peserta memahami tahap perkembangan anak, 75% mampu menerapkan teknik pengasuhan positif, dan 85% merasa lebih percaya diri sebagai ibu. Dampak positif juga dirasakan pada kesejahteraan keluarga, seperti komunikasi yang lebih baik antara orang tua dan anak (90%), perilaku anak yang lebih positif (70%), serta hubungan yang lebih harmonis antara pasangan (60%). Program ini berhasil memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan dalam keluarga dan komunitas, meskipun tantangan terkait

pengelolaan waktu bagi ibu rumah tangga tetap perlu diatasi di masa pendatang.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh (Nova, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Studi Feminisme dan Gender Pada Perempuan Gampong Balang Kureng Kabupaten Aceh Besar)” (2022). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran perempuan dalam pembangunan desa berdasarkan pengalaman nyata dan data lapangan. Program yang dilaksanakan mencakup berbagai aktivitas pembangunan desa yang melibatkan perempuan, seperti bank sampah untuk menghasilkan pupuk organik, pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) secara swadaya, dan program kesehatan yang menangani stunting, gizi buruk, serta Kesehatan lansia. Perempuan juga aktif di organisasi seperti PKK dan BPD, serta musyawarah desa untuk menentukan kebijakan pembangunan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi aktif perempuan di Balang Krueng sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desa, yang meraih penghargaan nasional sebagai desa sadar Pendidikan dan desa dengan BUMDes terbaik. Inovasi perempuan, seperti pengelolaan sampah, meningkatkan ekonomi desa melalui pendapatan asli gampong. Selain itu, peran perempuan memimpin inisiatif di sektor Pendidikan dan Kesehatan, menjadikan Balang Krueng sebagai model pembangunan berbasis kesetaraan gender.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh (Marsiana et al., 2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang”. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman subjektif individu dan interpretasi mereka terhadap dunia, yang dalam konteks ini adalah gaya kepemimpinan sekolah perempuan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Teori yang digunakan adalah kepemimpinan demokratis dan peran gender dalam kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah perempuan di SDN 01

Sepauk telah berhasil memenuhi peran mereka sebagai pemimpin yang menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kurikulum, sebagai inovator yang aktif menjalin hubungan Kerjasama dengan berbagai pihak, dan juga sebagai motivator yang menggali minat dan bakat siswa untuk meningkatkan prestasi mereka. Secara keseluruhan bahwa kepemimpinan perempuan di sektor Pendidikan tidak hanya efektif tetapi juga membawa dampak positif terhadap organisasi yang dipimpin dengan penekanan pada nilai-nilai Kerjasama pengembangan tim.

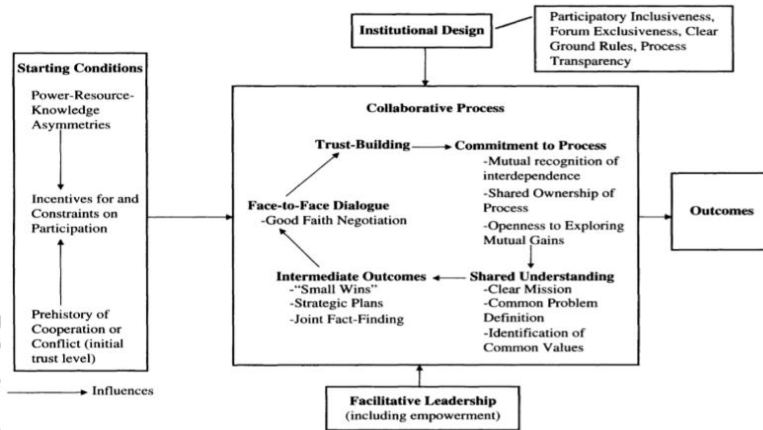
Setelah melihat beberapa penelitian sebelumnya, terbukti bahwa kajian terdahulu sudah meneliti tentang pemberdayaan perempuan di beberapa daerah, yang memiliki potensi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perempuan itu sendiri melalui program dan dalam bentuk dukungan sosial. Namun, setelah ditinjau tidak ada penelitian yang serupa yang meneliti tentang fenomena yang ada di lingkungan peneliti yaitu di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu dan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengaruh positif dan negatif serta penghambat pada program pemberdayaan masyarakat melalui sekolah desa perempuan di Desa Sumberejo. Oleh karena itu penelitian ini menjadi hal yang tepat untuk dilakukan.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan pendekatan strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini melibatkan sinergi antara pemerintah sebagai otoritas dengan masyarakat sipil yang memiliki peran sebagai mitra aktif dalam proses pembangunan pemberdayaan masyarakat. Teori *Collaborative Governance* dari (Ansell & Gash, 2008) menjelaskan kolaborasi menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan saling percaya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kolaborasi ini berfungsi untuk memadukan sumber daya dan keahlian guna menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini selaras dengan konsep

governance partisipatif yang mengakui peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.



Gambar 2.1 Model Collaborative Governance Menurut Ansell and Gash

Sumber: Di adopsi dari teori Ansell and Gash pada *Journal of Public Administration Research and Theory* (2008)

1. Kondisi Awal

Kondisi awal yang dimaksud adalah para pihak yang terlibat melakukan kepentingan dan memiliki visi misi yang sama, agar kerja sama dapat berjalan baik dan sesuai dengan proses kerja dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Desain Kelembagaan

Pemimpin mengajak para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan mengenai isu tersebut. *Collaborative Governance* di sini berkaitan dengan pencapaian kesepakatan bersama meskipun tidak selalu tercapai. Namun, semua kerja sama tidak harus didasari kesepakatan. Desain lembaga dalam kerja sama ini fokus pada aturan dan prosedur

yang jelas agar prosesnya terbuka dan membangun kerja sama yang baik antara para pemangku kepentingan dan pemimpin.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan diperlukan dalam proses kerja sama untuk mengarahkan jalannya negosiasi agar masalah dapat terpecahkan. Masalah sering muncul karena cara memimpin yang kurang tepat, tetapi bisa diperbaiki dengan cara berkonsultasi bersama, membangun kepercayaan antar pihak, menetapkan aturan yang jelas, serta membagi hasil secara adil.

4. Proses Kolaboratif

Variabel ini sangat penting dalam model *Colaboratif Governance*. Prosesnya adalah menciptakan rasa saling percaya dan membangun komitmen dalam membuat perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin memberikan visi dan misi yang jelas, serta kesamaan dan pemahaman yang terarah dalam menjalankan proses perencanaan kolaboratif tersebut.

Model yang diberikan oleh Ansell dan Gash dalam teori *Collaborative Governance* ternyata efektif dalam membangun kerja sama antara Pemerintah, para stakeholder, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dengan menerapkan kerja sama yang baik, saling percaya, serta memiliki visi dan misi yang jelas, maka masalah-masalah di Indonesia bisa teratasi secara bersama-sama. Salah satu masalah yang ada adalah pemberdayaan perempuan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah, masyarakat, serta para stakeholder, dan konsep dari teori *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash bisa menjadi acuan.

2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih

baik keadaan kehidupannya. Menurut (Afriansyah, 2023) pemberdayaan masyarakat adalah proses yang membantu masyarakat untuk memiliki kesempatan, semangat, motivasi, dan kemampuan dalam mengakses sumber daya, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan sendiri. Mereka juga terlibat dalam memengaruhi dan mewujudkan kualitas hidup diri serta komunitasnya. Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pasal 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan, kemampuan, kesadaran, serta penggunaan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuan inti dari pemberdayaan adalah membangkitkan semua kemampuan yang ada di desa guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini dicapai melalui motivasi, inisiatif, dan kreativitas dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Sementara itu menurut (Endah, 2020) Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari konsep pembangunan yang mengutamakan masyarakat sebagai pelaku utama. Proses pemberdayaan bisa dimulai dari tahap perencanaan, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk mewujudkan pemberdayaan tersebut, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan setempat, yaitu desa tempat masyarakat tinggal. Tujuan utama pemberdayaan adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan mampu memanfaatkan potensi lokal, baik dari sumber daya manusia maupun alam, untuk meningkatkan kualitas hidup. Prinsip pemberdayaan mencakup partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, keberlanjutan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal serta adat istiadat setempat.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat dapat mandiri, yaitu kondisi di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk berpikir, mengambil keputusan, dan menjelaskan sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Mandiri ini dicapai melalui kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatkan kemandirian masyarakat, kualitas hidup mereka akan meningkat. Hal ini dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang mendukung perubahan dan kemajuan. Pemberdayaan tidak hanya ditujukan pada masyarakat yang tidak berdaya, tetapi juga diberikan kepada masyarakat yang sudah memiliki daya, namun masih terbatas dalam mencapai kemandirian. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki masyarakat perlu dikembangkan dan dikupas lebih lanjut.

Cara untuk mewujudkan pemberdayaan ini adalah dengan memberikan atau meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang hal-hal yang dapat mendukung kehidupan mereka. Hal ini karena kurangnya pendidikan, baik pendidikan yang rendah maupun tidak memiliki pendidikan sama sekali, menjadi penyebab utama ketidakberdayaan. Pendidikan juga merupakan pusat dalam pembangunan manusia yang cerdas dan berkualitas, serta mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya demi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Menurut (Afriansyah, 2023) prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi pertama, prinsip kesetaraan menekankan pentingnya memberikan hak yang sama kepada semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program yang ada. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dilakukan tanpa diskriminasi gender atau status sosial. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat

dalam kegiatan yang ditawarkan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana semua suara didengar dan dihargai, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program-program tersebut.

Kedua, prinsip partisipasi mengharuskan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam setiap aspek pemberdayaan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Untuk meningkatkan partisipasi, sosialisasi dan pendampingan dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Namun, tantangan muncul ketika praktik di lapangan tidak sejalan dengan teori yang disampaikan, menyebabkan minat masyarakat untuk berpartisipasi menjadi rendah. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan program yang relevan dan menarik bagi masyarakat agar mereka mau terlibat secara aktif.

Ketiga, keswadayaan, atau kemandirian, merupakan prinsip yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengusulkan program sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberdayaan masyarakat harus mendorong inisiatif lokal dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Dengan memberikan dana dan sarana prasarana yang dibutuhkan, masyarakat dapat merasa lebih berdaya dan memiliki kontrol atas proses pemberdayaan yang mereka jalani.

Terakhir, prinsip berkelanjutan menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Indikator keberlanjutan dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota serta hasil dari program-program yang ada. Untuk mencapai tujuan ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat sangat penting agar mereka dapat terus beradaptasi dan mengembangkan usaha mereka sendiri.

Indikator keberhasilan pemberdayaan dapat diukur melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta

kontribusi mereka terhadap pengambilan keputusan dalam pembangunan desa. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat menyangkutkan dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak menaruh kepedulian untuk memberdayakan seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga swadaya masyarakat untuk peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

2.2.3 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai seberapa besar peran perempuan dalam aspek ekonomi. Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi yang produktif untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pendapat dari (Abdurrahman & Tusianti, 2021) Pemberdayaan perempuan bertujuan memberikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Selain peran perempuan dalam aspek ekonomi, pemberdayaan juga bertujuan meningkatkan status sosial dan politik perempuan agar tercapai pembangunan yang transparan dan berkelanjutan di semua bidang kehidupan. Pemberdayaan perempuan juga merupakan strategi penting yang harus diterapkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu berkarya dan mandiri. Kesadaran akan pentingnya pemberdayaan perempuan harus terus berkembang dan diwujudkan melalui program-program yang terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya mengembalikan kekuasaan dengan cara mengubah struktur sosial. Kedudukan perempuan akan semakin baik ketika mereka bisa mandiri dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hidupnya. Ada dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai bentuk kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat ikut serta secara bersama-sama dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses di mana individu atau

masyarakat terlibat langsung dalam upaya meningkatkan kesadaran, memperluas pemahaman, dan melakukan pengorganisasian bersama, agar mereka bisa berpartisipasi secara aktif. Adapun menurut (Wahyuningsih & Pradana, 2021) pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan peran perempuan baik di dominan publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

1. Membongkar Mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah *konco wingking* (teman belakang) bagi suami serta anggapan “*swarga nuntut neraka katut*” (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata *manut* dan *katut* dalam bahasa Jawa berarti pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya tergantung kepada suami.
2. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan yang bisa diajarkan, diantaranya: keterampilan menjahit, menyulam, serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya sebagian besar pendidikan bagi perempuan.

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang maupun sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita dan keinginan semua orang. Untuk mengetahui

keberhasilannya adapun indikatornya pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi mereka
3. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya dengan laki-laki.
4. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan pemerintahan.
5. Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

Terdapat beberapa prinsip utama dalam pemberdayaan perempuan yang harus diperhatikan untuk memastikan keberhasilan proses ini (Hijratullah, 2021). Yang pertama, kesetaraan adalah prinsip fundamental dalam pemberdayaan perempuan. Ini mencakup kesetaraan status antara perempuan dan laki-laki serta antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan. Dengan membangun mekanisme yang memungkinkan berbagi pengetahuan dan pengalaman, hubungan yang setara dapat terjalin, sehingga setiap pihak saling mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing, menciptakan proses pembelajaran bersama.

Prinsip kedua, partisipasi juga merupakan prinsip penting dalam pemberdayaan perempuan. Partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program yang berkaitan dengan mereka sangat diperlukan. Dengan melibatkan perempuan dalam setiap tahap, mereka tidak hanya

menjadi sasaran pembangunan tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang aktif.

Prinsip ketiga, kemandirian menekankan pentingnya menghargai dan mengedepankan kemampuan perempuan. Pemberdayaan tidak seharusnya memperlakukan perempuan sebagai objek ketidakberdayaan, melainkan sebagai individu dengan potensi yang perlu dieksplorasi. Perempuan memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi melalui kreativitas dan inovasi mereka. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan harus memfokuskan pada pengembangan kapasitas dan kemandirian perempuan.

Prinsip keempat, keberlanjutan adalah prinsip terakhir yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan. Meskipun dukungan dari pihak luar mungkin diperlukan pada awalnya, penting untuk merancang program pemberdayaan yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Seiring waktu, peran pendampingan harus berkurang, dan masyarakat harus mampu melanjutkan inisiatif mereka sendiri tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ini dalam pemberdayaan perempuan diharapkan dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan perempuan, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Namun, lebih dari itu semua adalah terciptanya pola pikir dan paradigma yang memiliki hak sama dengan laki-laki. Perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa kegiatan yang memang proposinya. Jika semua telah terealisasikan dengan baik dan benar, maka perempuan benar-benar telah terberdayakan. Hal tersebut juga memerlukan kesadaran perempuan mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, agar pembangunan yang

dilakukan dapat dirasakan seluruh pihak, terutama pada pertumbuhan ekonomi. Melalui indikator-indikator ini, keberhasilan program pemberdayaan perempuan dapat dievaluasi secara komprehensif, memastikan bahwa upaya pemberdayaan berjalan efektif dan berkelanjutan.

2.2.4 Sekolah Perempuan Desa

Sekolah perempuan desa merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut pendapat (Razak et al., 2020) definisi sekolah perempuan desa mencakup lembaga pendidikan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka, serta peran mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Tujuan utama dari sekolah ini adalah untuk menciptakan perempuan yang mandiri, berdaya, dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap komunitas mereka. Dengan demikian, sekolah perempuan desa berperan penting dalam mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip yang mendasari sekolah perempuan desa meliputi kesetaraan, di mana semua perempuan memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan dan pelatihan;

1. Partisipasi aktif, yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan;
2. Kemandirian, yang menekankan pada pengembangan potensi individu dan kolektif perempuan
3. Keberlanjutan, yang memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi peserta didik.

Indikator keberhasilan dari sekolah perempuan desa dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti tingkat partisipasi perempuan dalam program pendidikan, peningkatan keterampilan yang relevan

dengan kebutuhan pasar kerja, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta perubahan dalam kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, indikator lain dapat mencakup pengurangan angka kekerasan berbasis gender di komunitas, serta peningkatan kemandirian ekonomi peserta didik setelah mengikuti program. Melalui indikator-indikator ini, keberhasilan sekolah perempuan desa dapat dievaluasi secara komprehensif, sehingga dapat terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan secara efektif.

2.2.5 Perempuan Cerdas

Perempuan cerdas dapat didefinisikan sebagai individu perempuan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk berpikir kritis serta mengambil keputusan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka tidak hanya terampil dalam bidang akademis, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekitar. Perempuan cerdas berperan penting dalam masyarakat, karena mereka mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, kecerdasan perempuan mencakup pemahaman tentang hak-hak mereka, kesadaran akan isu-isu gender, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan utama dari pemberdayaan perempuan cerdas adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memberdayakan perempuan untuk menjadi cerdas, diharapkan mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, komunitas, dan pemerintahan. Selain itu, pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk mengadvokasi perubahan sosial yang positif. Dengan demikian,

perempuan cerdas diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mempengaruhi kebijakan dan praktik yang mendukung kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Ada beberapa prinsip dasar yang mendasari pemberdayaan perempuan cerdas. Pertama adalah kesetaraan, yang menekankan pentingnya memberikan akses yang sama kepada perempuan dalam pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. Kesetaraan ini juga mencakup pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Kedua adalah partisipasi aktif, di mana perempuan didorong untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Ketiga adalah kemandirian, yang menekankan bahwa perempuan harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Prinsip ini juga mencakup pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar perempuan dapat mandiri secara ekonomi. Terakhir adalah keberlanjutan, di mana program-program pemberdayaan harus dirancang agar dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi perempuan dan komunitas.

Untuk mengevaluasi keberhasilan pemberdayaan perempuan cerdas, beberapa indikator dapat digunakan. Pertama, tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan formal dan non-formal menjadi indikator penting. Hal ini mencakup angka kelulusan dan akses terhadap program pelatihan keterampilan. Kedua, kemandirian ekonomi dapat diukur melalui proporsi perempuan yang memiliki usaha sendiri atau terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Ketiga, kesadaran hukum dapat dievaluasi dengan mengukur seberapa banyak perempuan memahami hak-hak mereka dan akses ke layanan hukum. Keempat, partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas juga menjadi indikator

penting untuk menilai sejauh mana perempuan terlibat dalam proses tersebut. Terakhir, perubahan perilaku sosial dapat diukur melalui survei mengenai sikap masyarakat terhadap peran perempuan.

Secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan cerdas merupakan langkah strategis untuk mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, serta penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan yang solid, diharapkan akan tercipta generasi perempuan yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial ekonomi di lingkungan mereka.

2.2.6 Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan bentuk pendidikan yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di luar sistem persekolahan formal menurut Basleman (Ii, n.d.). Pendidikan ini menekankan pada proses belajar yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, tanpa batasan usia maupun jenjang pendidikan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan di Desa Sumberejo, prinsip PLS sangat relevan karena memberikan kesempatan kepada perempuan yang tidak dapat mengakses pendidikan formal untuk tetap memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berguna bagi peningkatan kualitas hidupnya. Seperti yang dijelaskan oleh Basleman, PLS adalah kegiatan yang terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar yang bersifat praktis dan fungsional dalam kehidupannya sehari-hari.

Fungsi utama Pendidikan Luar Sekolah adalah membelajarkan masyarakat agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memperbaiki taraf hidup. Melalui pelatihan, diskusi, dan kegiatan pemberdayaan, PLS berperan sebagai substitusi, suplemen, dan komplemen terhadap pendidikan formal. Di Desa Sumberejo, Sekolah Desa Perempuan (SPD) menjadi salah

satu bentuk nyata pelaksanaan PLS karena berfungsi sebagai wadah pembelajaran nonformal bagi perempuan desa. Melalui kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan sosialisasi hak-hak perempuan, SPD berkontribusi langsung dalam pengembangan potensi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal.

Selain itu, karakteristik PLS yang berorientasi pada kebutuhan warga belajar tercermin jelas dalam pelaksanaan SPD. Proses pembelajaran berlangsung secara partisipatif, berbasis masyarakat, dan menggunakan pendekatan demokratis. Peserta memiliki kebebasan menentukan apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana cara mereka berpartisipasi dalam kegiatan. Dengan demikian, SPD tidak hanya menjadi sarana pendidikan, tetapi juga wadah pembentukan kesadaran sosial, ekonomi, dan politik bagi perempuan desa. Melalui prinsip PLS, SPD Desa Sumberejo berhasil menciptakan ruang belajar yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pendidikan sepanjang hayat.

